

Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran Persatuan Insinyur Indonesia

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah

Audiensi Pengurus Pusat PII dengan Wakil Menteri Dalam Negeri
Dipresentasikan oleh: Tim Ad Hoc Indeks Keinsinyuran PII

Jakarta, 10 Maret 2026



Daftar Isi

01

Pendahuluan

Sekilas Tentang PII · Visi dan Misi PII 2024–2027

02

Latar Belakang dan Konsep Indeks Keinsinyuran PII

Latar Belakang · Definisi · Tujuan · Metodologi Pengukuran

03

Hasil dan Manfaat

Hasil Pengukuran · Penghargaan Keinsinyuran PII · Manfaat Penghargaan

04

Peran PII dan Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Tim Ad Hoc · Peran PII

05

Kesimpulan

Ringkasan temuan dan harapan ke depan

Sekilas Tentang PII

Persatuan Insinyur Indonesia

PII adalah organisasi profesi yang mewadahi para Insinyur dari berbagai disiplin teknik di seluruh Indonesia. Awalnya beranggotakan 75 orang, PII kini telah berkembang pesat menjadi organisasi profesi keinsinyuran terbesar di Indonesia.

90K

Insinyur Terdaftar

280

Cabang Kab/Kota

30

Wilayah Provinsi

27

Badan Keahlian

Mandat Undang-Undang

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PII diberikan mandat sebagai:

- Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur (LSKI).
- Penerbit Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP).
- Organisasi yang berwenang melakukan registrasi Insinyur (STRI).

Setiap Insinyur yang akan menjalankan praktik keinsinyuran wajib memiliki SKIP dan STRI yang diterbitkan oleh PII.

ADR Webinar 2025

MITIGATING CONSTRUCTION CHALLENGES:

DISPUTE AVOIDANCE & RESOLUTION

DATE:
12 DEC 2025
(FRIDAY)

TIME:
2PM - 5PM
(JAKARTA TIME GMT+7)



LANGUAGE:
ENGLISH &
BAHASA INDONESIA



ABOUT THE WEBINAR

The ADR Webinar 2025 brings together mediation and construction industry professionals from across Indonesia to explore innovative approaches to dispute avoidance and resolution.

Join us for a half-day online program featuring practical insights, regional perspectives, and engaging discussions aimed at promoting effective mediation in the construction sector in Indonesia.

PROGRAM

SESSION 1



The Legal Framework for Construction Mediation in Indonesia

SESSION 2



Dispute Avoidance and Early Mediation in Construction Projects

SESSION 3



Overcoming Industry Resistance – Building Trust in Mediation

SCAN
TO REGISTER!



FEE

IDR 250,000

Secure your spot today and be part of this meaningful regional dialogue on advancing mediation in construction.

BAGIAN 1 – PENDAHULUAN

Peran Strategis PII dalam Pembangunan Nasional



Menjaga Kualitas Praktik Keinsinyuran

PII memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas praktik keinsinyuran di Indonesia, memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam setiap proyek teknis.



Kolaborasi Internasional

PII aktif menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti WFEO (World Federation of Engineering Organizations) untuk memperkuat daya saing Insinyur Indonesia di kancah global.



Advokasi Kebijakan Publik

PII berperan dalam advokasi kebijakan publik terkait pembangunan infrastruktur, energi, lingkungan, dan teknologi, melalui kajian teknis dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan.



GAGASAN STRATEGIS
PRABOWO SUBIANTO

STRATEGI TRANSFORMASI BANGSA

MENUJU INDONESIA EMAS 2045

INDONESIA
MENJADI NEGARA
MAJU DAN MAKMUR



BAGIAN 1 – PENDAHULUAN

PII Menuju Indonesia Emas 2045

Saat ini PII secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mendorong re-industrialisasi Indonesia menuju **Indonesia Emas 2045**. Dengan 90.000 insinyur yang tersebar di seluruh nusantara, PII siap menjadi motor penggerak pembangunan berbasis teknologi dan inovasi.

"Insinyur Nusantara di Garda Depan Indonesia Emas: Menghidupkan Asta Cita Dari Daerah Ke Pusat."





BAGIAN 1 – PENDAHULUAN

Struktur Organisasi Pengurus Pusat PII 2024–2027

Struktur organisasi PII dirancang untuk memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota insinyur di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota.



Pimpinan Pengurus Pusat PII 2024–2027

Ketua Umum

Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU

Wakil Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, ST., MT., IPU., ASEAN Eng.

Kepala Satuan Pengawas Internal

Dr. Ir. Abdullah Qiqi Asmara, S.T., M.Si., M.Kom., IPU

Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA., IPU., ACPE., ASEAN Eng., APEC Eng.

Bendahara Umum

Ir. Hilmi Panigoro, MBA., MSc.

Direktur Eksekutif

Ir. Santhi H. Serad, M.Sc., IPU

Visi dan Misi PII 2024–2027

Visi 2024–2027

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai wadah strategis bagi Insinyur Nusantara untuk mewujudkan Indonesia Emas yang mandiri, maju, dan berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi.

Misi 2024–2027

1. Mewujudkan Insinyur Nusantara yang Terbuka, Inovatif, dan Kolaboratif baik Nasional dan Internasional;
2. Memperkuat Literasi Digital sebagai Fondasi Transformasi Keinsinyuran;
3. Menerapkan Strategi Produk dan Jasa Industri Berbasis Teknologi Tepat Guna;
4. Menginisiasi dan Mengembangkan Proyek Percontohan di Berbagai Sektor dan Wilayah Indonesia; dan
5. Melakukan Transformasi Digital dalam Tata Kelola dan Manajemen Organisasi PII.

Latar Belakang Indeks Keinsinyuran PII

Untuk mendukung pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah yang selaras dengan penerapan praktik keinsinyuran, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menginisiasi Indeks Keinsinyuran PII – sebuah indeks yang dirancang untuk mengukur kinerja keinsinyuran pemerintah daerah dan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja keinsinyuran terbaik.

- Dalam melaksanakan inisiatif ini, PII membentuk Tim Pelaksana yang bersifat Ad Hoc di lingkungan Pengurus Pusat PII, yang bertugas merancang metodologi, melaksanakan pilot test, dan mengkoordinasikan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Mengapa Praktik Keinsinyuran Penting bagi Pemerintah Daerah?

Pemerintah daerah perlu memperhatikan penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan di daerahnya, karena praktik ini menjamin bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara ilmiah, efisien, dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kualitas dan Keamanan

Menjamin kualitas dan keamanan infrastruktur dan teknologi di daerah.

Efisiensi Anggaran

Mendukung efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kepatuhan Regulasi

Memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Daya Saing Daerah

Meningkatkan daya saing dan reputasi daerah di tingkat nasional, menuju reputasi global.

Definisi Indeks Keinsinyuran PII

Apa itu Indeks Keinsinyuran PII?

Indeks Keinsinyuran PII adalah ukuran tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Ruang Lingkup Pengukuran

Indeks ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah – baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota – telah mengintegrasikan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pelaksanaan proyek, hingga dampak berkelanjutan.

Tujuan Indeks Keinsinyuran PII

1

Mengukur Penerapan Praktik Keinsinyuran

Mengetahui sejauh mana penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan di berbagai daerah Indonesia.

2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan

Membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

3

Mendorong Kepatuhan Regulasi

Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah mengenai kewajiban penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

4

Memberikan Pengakuan Nasional

Memberikan pengakuan dan meningkatkan reputasi secara nasional bagi penerima Penghargaan Keinsinyuran PII.

5

Mendorong Kolaborasi Strategis

Mendorong kolaborasi PII dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan dengan pendekatan teknokratik berbasis solusi teknologi.

Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII didesain berdasarkan 5 komponen utama dan 2 komponen pendukung yang saling melengkapi untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terukur.

Komponen Utama

- 1 Indikator**
OPD yang dipilih secara selektif sebagai unit penilaian.
- 2 Aspek**
4 aspek utama penerapan keinsinyuran di daerah.
- 3 Parameter**
9 parameter untuk 4 aspek pengukuran indeks.
- 4 Kriteria**
5 tingkatan kriteria kualifikasi tenaga ahli.
- 5 Predikat Indeks**
Skala penilaian dari Kurang hingga Memuaskan.

Komponen Pendukung

Bobot

Pembobotan OPD berdasarkan survei lapangan atas komposisi Tenaga Ahli ASN.

Rasio Tenaga Ahli

Rasio jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN terhadap total Tenaga Ahli ASN (Teknik dan Non-Teknik) di setiap OPD.



BUPATI ROKAN HULU

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Rokan Hulu
2. Pimpinan Perusahaan se Kabupaten Rokan Hulu

SURAT EDARAN
Nomor 41.44 Tahun 2025

TENTANG

INDEKS DAN PENGHARGAAN KEINSINYURAN PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
BAGI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan keinsinyuran di Kabupaten Rokan Hulu, maka Persatuan Insinyur Indonesia (PII) akan melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks dan Penghargaan Keinsinyuran PII untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025. Indeks Keinsinyuran diusulkan untuk membantu Pemerintah Pusat memantau kepatuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan Keinsinyuran bagi Tenaga Ahli Teknik, pelaku usaha, dan Industri, Sarjana Teknik, Sarjana Terapan di Bidang Teknik, dan Sarjana Sains yang bergelar Insinyur yang ada di Kabupaten Rokan Hulu maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan audiensi PII Pusat dengan Bupati Rokan Hulu tanggal 15 September 2025 tentang pengukuran Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa perlu mendorong Aparatur Sipil Negara dan Pelaku Industri Ahli Teknik yang bergelar Insinyur, Sarjana Teknik, Sarjana Terapan di Bidang Teknik, dan Sarjana Sains untuk ikut menjadi anggota PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keinsinyuran.
2. Tim PII Pengurus Wilayah Riau dan Pengurus Cabang Rokan Hulu bersedia membantu dan mendampingi dalam proses pendaftaran keanggotaan.
3. Informasi lebih lanjut terkait persyaratan dan pendaftaran keanggotaan PII bisa diakses pada tautan: <https://updmember.pii.or.id/auth/register>.
4. Menyebarkan informasi ini kepada Aparatur Sipil Negara dan Pelaku Industri Ahli Teknik yang bergelar Insinyur, Sarjana Teknik, Sarjana Terapan di Bidang Teknik, dan Sarjana Sains.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 September 2025



BAGIAN 2 – INDIKATOR

Indikator, Aspek, dan Parameter Pengukuran

Indikator: OPD

Indikator yang digunakan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipilih secara selektif:

- 16 OPD untuk Provinsi
- 15 OPD masing-masing untuk Kabupaten dan Kota

Aspek: 4 Dimensi Utama

Pengukuran dilakukan melalui 4 aspek yang mencerminkan berbagai dimensi penerapan keinsinyuran dalam pembangunan daerah secara menyeluruh.

Parameter: 9 Kriteria Terukur

Tersedia 9 parameter spesifik yang digunakan untuk menilai keempat aspek pengukuran Indeks Keinsinyuran secara terstruktur dan objektif.

4 Aspek Pengukuran Indeks Keinsinyuran

No.	Aspek	Deskripsi	Landasan UU Keinsinyuran
1	Kelembagaan dan Kebijakan.	Mengukur kesesuaian kebijakan teknis daerah dengan standar Keinsinyuran.	Pasal 8, 10, 16, 50
2	Sumber Daya Manusia.	Mengukur jumlah dan komposisi Insinyur yang memenuhi kepatuhan berdasarkan ketentuan UU Keinsinyuran.	Pasal 9–12
3	Proyek Keteknikan.	Mengukur kepatuhan penerapan ketentuan Keinsinyuran dalam proyek keteknikan untuk pembangunan di daerah.	Pasal 4, 6, 16, 50
4	Dampak dan Keberlanjutan.	Mengukur dampak hasil kerja Keinsinyuran pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.	Pasal 4–6, 10

Parameter Pengukuran: Aspek Kelembagaan dan Kebijakan

1

Parameter A1.1 — Kebijakan Tertulis

Apakah ada **kebijakan tertulis** dari Instansi Pemda yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?

2

Parameter A1.2 — ASN Sarjana Teknik

Apakah Instansi memiliki **ASN berlatar belakang sarjana teknik*** yang telah berkontribusi pada profesi Insinyur dalam kegiatan pembangunan bidang keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan?

3

Parameter A1.3 — Keterlibatan di PII

Apakah Instansi memberikan **kesempatan bagi ASN sarjana teknik*** untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII sebagai bagian dari pengembangan profesi?

(* **sarjana teknik atau sarjana sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains (Pasal 7, ayat (2), huruf a,b).**

Parameter Pengukuran: Aspek SDM dan Proyek Keteknikan

1

A2.4 — Monitoring dan Evaluasi

Apakah Instansi melakukan **monitoring dan evaluasi** terhadap ASN sarjana teknik* atas kepatuhannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?

2

A2.5 — Fasilitas Pengembangan

Apakah Instansi memberikan **fasilitas/peluang** bagi ASN sarjana teknik* untuk mengembangkan pengetahuannya melalui training, conference, atau pembelajaran lainnya?

3

A3.6 — Kebijakan NSPK

Apakah ada **kebijakan tertulis PEMDA berupa NSPK** (misal: syarat minimal dokumen tender, standar kompetensi perencana atau pengawas proyek, standar minimal pelayanan dan lain-lainnya) yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran dan menyebutkan persyaratan personil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?

(* **sarjana teknik atau sarjana sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains (Pasal 7, ayat (2), huruf a,b).**

Parameter Pengukuran: Aspek Proyek dan Dampak Keberlanjutan

1

A3.7 — Insinyur Bersertifikat STRI

Apakah proyek-proyek pembangunan PEMDA dirancang dan diawasi oleh **Insinyur yang memiliki STRI** (Surat Tanda Registrasi Insinyur)?

2

A3.8 — Adopsi Teknologi Mutakhir

Apakah proyek-proyek yang dilaksanakan PEMDA telah **mengadopsi teknologi termutakhir** seperti sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, dan inovasi teknologi lainnya?

3

A4.9 — Penghargaan Pembangunan

Apakah PEMDA dan/atau Instansi pernah **menerima penghargaan pembangunan** seperti Adipura, SPBE, penghargaan keberlanjutan, dan penghargaan pembangunan lainnya?

Kriteria Kualifikasi Tenaga Ahli

Setiap tenaga ahli yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah diklasifikasikan dalam 5 tingkatan kriteria, mulai dari yang paling dasar hingga yang optimal sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.



Tingkat 1 — Pemula

Lulusan sarjana bidang teknik, sarjana terapan, sarjana pendidikan teknik, atau sarjana sains yang disetarakan.



Tingkat 2 — Pendidikan Profesi

Tenaga ahli yang sedang mengikuti pendidikan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).



Tingkat 3 — Profesi

Tenaga ahli yang telah memperoleh gelar Insinyur (Ir.) melalui program profesi resmi.



Tingkat 4 — Proses FAIP

Tenaga ahli yang sedang dalam proses uji kompetensi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).



Tingkat 5 — Profesional dan Terdaftar (Optimal)

Tenaga ahli yang sudah memiliki SKIP dan STRI – kondisi ideal yang menjadi target capaian.

Predikat Indeks Keinsinyuran PII

Pemerintah daerah akan menerima predikat berdasarkan angka indeks yang diperoleh. Sistem predikat ini mengacu pada ketentuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Pedoman Menteri PANRB RI Nomor 3 Tahun 2024.

Memuaskan

Angka Indeks: 4,2 – 5,0

Tingkat kepatuhan tertinggi dalam penerapan praktik keinsinyuran.

Sangat Baik

Angka Indeks: 3,5 – <4,2

Penerapan keinsinyuran yang sangat konsisten dan terstruktur.

Baik

Angka Indeks: 2,6 – <3,5

Penerapan keinsinyuran yang memadai dengan ruang perbaikan.

Cukup

Angka Indeks: 1,8 – <2,6

Kepatuhan dasar terpenuhi namun perlu peningkatan signifikan.

Kurang

Angka Indeks: <1,8

Perlu intervensi mendasar dalam penerapan keinsinyuran daerah.

Pembobotan dan Rasio Tenaga Ahli ASN

Pembobotan OPD

Pembobotan pada masing-masing OPD ditentukan berdasarkan **hasil survei lapangan** atas komposisi Tenaga Ahli ASN di masing-masing OPD. Pembobotan ini memastikan bahwa penilaian mencerminkan proporsi yang relevan dan adil sesuai dengan karakteristik setiap instansi pemerintah daerah.

Rasio Tenaga Ahli Teknik ASN

Rasio jumlah **Tenaga Ahli Teknik ASN** di setiap OPD dihitung dengan membandingkan jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN terhadap total jumlah Tenaga Ahli ASN (Teknik dan Non-Teknik).

📄 **Definisi ASN:** PNS + P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengumuman Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

Hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII akan diumumkan secara resmi melalui Laporan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dan dilaporkan kepada instansi-instansi berikut:



Kementerian Dalam Negeri

Sebagai mitra strategis utama dalam pembinaan pemerintah daerah.



Kementerian PANRB

Untuk integrasi dengan sistem evaluasi pemerintahan nasional.



APPSI, APKASI, APEKSI

Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia.



Seluruh Pemda Peserta

Setiap pemerintah daerah yang berpartisipasi akan menerima laporan hasil pengukurannya.





BAGIAN 3 – PENGHARGAAN

Penghargaan Keinsinyuran PII

Dari hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII setiap tahun, akan diberikan penghargaan kepada sejumlah daerah berupa Penghargaan Keinsinyuran PII – penghargaan tahunan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks tertinggi, dibagi dalam 3 klasifikasi dan masing-masing dalam 3 kategori.

📅 Penghargaan Keinsinyuran PII pertama akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan capaian Indeks Keinsinyuran terbaik pada **tanggal 10 Agustus 2026**, yang bertepatan dengan HAKTEKNAS 2026 – Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Klasifikasi Provinsi

Penghargaan bagi pemerintah provinsi dengan indeks keinsinyuran tertinggi pada kategori besar, menengah dan kecil.

Klasifikasi Kabupaten

Penghargaan bagi pemerintah kabupaten dengan kinerja keinsinyuran terbaik pada kategori besar, menengah dan kecil.

Klasifikasi Kota

Penghargaan bagi pemerintah kota dengan indeks keinsinyuran tertinggi pada kategori besar, menengah dan kecil.

Manfaat Penghargaan Keinsinyuran PII bagi Daerah



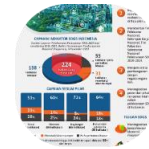
Menjamin Kualitas dan Keamanan Infrastruktur

Mendorong penerapan standar teknis yang ketat sehingga infrastruktur dan teknologi yang dibangun memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas yang terukur.



Mendukung Efisiensi Anggaran dan Akuntabilitas

Penerapan praktik keinsinyuran yang terstandar mendorong efisiensi anggaran pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.



Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berbasis keinsinyuran memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang.



Meningkatkan Daya Saing Daerah

Daerah penerima penghargaan memperoleh **pengakuan nasional** yang meningkatkan daya tarik investasi dan **daya saing** dalam konteks pembangunan nasional.

Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad Hoc 2025

Dalam penyusunan konsep pengukuran Indeks Keinsinyuran, diperlukan data nama-nama Dinas dan Badan di Pemerintah Daerah serta jumlah Tenaga Ahli Teknik dan Non-Teknik di masing-masing OPD, beserta sampel bukti dokumenter yang diperlukan di setiap parameter.

Daerah Referensi Pilot Test:

Provinsi: DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Bali

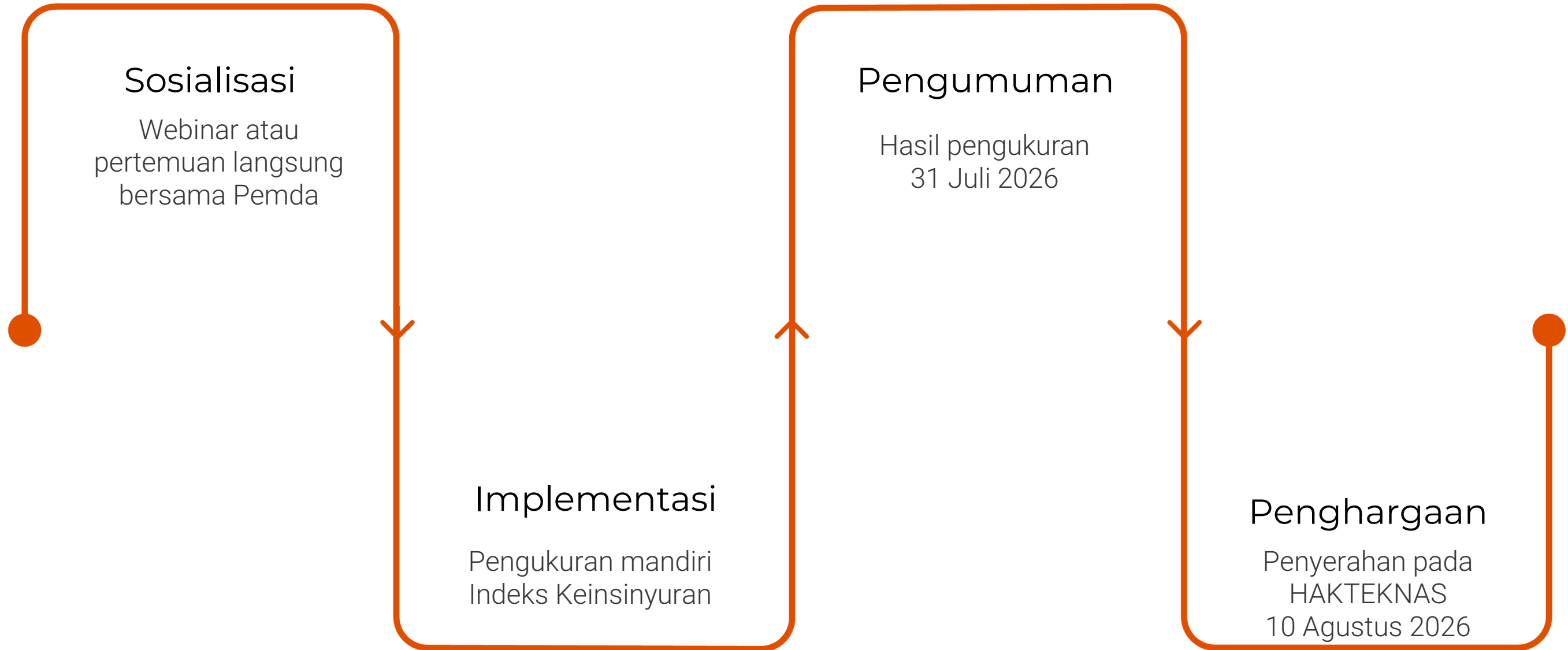
Kabupaten: Bandung dan Rokan Hulu

Kota: Surabaya dan Pontianak

Tujuan Pilot Test

Diperlukan pilot test di 8 pemerintah daerah terpilih untuk memvalidasi konsep pengukuran Indeks Keinsinyuran sebelum implementasi nasional. Pilot test ini akan mengidentifikasi celah metodologi dan memastikan instrumen pengukuran dapat diterapkan secara konsisten di berbagai jenis daerah.

Tahapan Implementasi Indeks Keinsinyuran PII



Sosialisasi akan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, APPSI, APKASI, dan APEKSI. Waktu pelaksanaan sosialisasi dan pengukuran mandiri akan ditentukan setelah audiensi dengan kelima instansi dapat terlaksana.

Peran PII dalam Ekosistem Keinsinyuran Daerah

Peran PII

PII berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan keinsinyuran di Indonesia melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain:

- Pelatihan dan sertifikasi insinyur profesional;
- Pengembangan keprofesian berkelanjutan (CPD);
- Penelitian dan kajian teknis berbasis ilmu pengetahuan;
- Advokasi kebijakan pembangunan berbasis keinsinyuran.

Upaya PII

PII juga berupaya meningkatkan profesionalisme Insinyur dan kualitas keinsinyuran melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk:

- Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Fasilitasi akses program PSPPI dan sertifikasi kompetensi Insinyur profesional bagi ASN teknik daerah;
- Kolaborasi dalam monitoring dan evaluasi proyek keteknikan.



Kesimpulan

"Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembangunan daerah berbasis praktik keinsinyuran yang terstandar, akuntabel, dan berkelanjutan."

→ **Instrumen Pengukuran yang Terstruktur**

Indeks Keinsinyuran PII dirancang dengan metodologi yang komprehensif – mencakup 4 aspek dan 9 parameter – untuk menghasilkan penilaian yang objektif dan dapat diperbandingkan antar daerah.

→ **Pendorong Kepatuhan Regulasi**

Program ini mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif mematuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dalam setiap aspek pembangunan daerahnya.

→ **Platform Kolaborasi Nasional**

Melalui koordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PANRB, dan asosiasi pemerintah daerah, Indeks Keinsinyuran PII menjadi platform kolaborasi nasional yang memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Keinsinyuran dalam pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**.



Mohon Saran dan Dukungan Kementerian Dalam Negeri

Persatuan Insinyur Indonesia dengan sepenuh hati memohon saran, masukan, dan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam mewujudkan Indeks Keinsinyuran PII sebagai instrumen nasional yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Dukungan Regulasi

Arahan dan kebijakan yang memfasilitasi penerapan Indeks Keinsinyuran dalam sistem evaluasi pemerintah daerah.

Dukungan Koordinasi

Fasilitasi sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah melalui jaringan Kemendagri yang luas.

Dukungan Implementasi

Kerja sama dalam pengumpulan data, validasi, dan pengumuman hasil Indeks Keinsinyuran secara nasional.



Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia.

"Bersama, kita wujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan – demi Indonesia Emas 2045."

Tim Ad Hoc Indeks
Keinsinyuran PII
Pengurus Pusat Persatuan
Insinyur Indonesia

Jakarta, 10 Maret 2026
Audiensi dengan Wakil Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia